

Abstrak

Penerimaan pajak memiliki peran besar dalam penerimaan negara sehingga bendahara pemerintah memiliki peran yang cukup besar dalam pencapaian target pendapatan negara. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam menulis karya tulis yang berjudul “Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Bendahara Pemotongan Dan Pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bendahara Dispendukcapil menghitung, menyeter, melaporkan pajak yang telah dipotong dan dipungut, hambatan yang dialami oleh bendahara dan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dipotong/pungut oleh bendahara di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan 2 jenis metode dalam penulisan karya tulis, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo telah melaksanakan dengan cukup baik dalam pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2). Namun, masih ditemukan beberapa kesalahan dalam melaksanakan perhitungan dan tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan. Jumlah penerimaan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan di Tahun 2020 sejalan dengan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara Dispendukcapil. Hambatan yang dialami oleh bendahara salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan mendasar dalam kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan oleh bendahara pemerintah.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), Bendahara Pemerintah.

Abstract

This is the reason behind the author in writing a paper entitled "Review of Compliance with the Obligations of the Treasurer for Withholding and Collecting Income Tax Article 22, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 Paragraph (2) on the Procurement of Goods and Services at the Population Office and Civil Registry of Karo Regency Before and During the Covid-19 Pandemic". This paper aims to find out how the Treasurer of the Dispendukcapil calculates deposits, reports taxes that have been withheld and collected, the obstacles experienced by the treasurer and the amount of income tax revenues withheld by the treasurer in Karo Regency. The author uses two types of methods in writing papers, namely literature research methods and field research methods. The results of this study show that the treasurer of the Population and Civil Registration Service of Karo Regency has done quite well in withholding and collecting Income Tax Article 22, Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 Paragraph (2). However, some errors were still found in the calculations and not the reporting as it should have been done. The amount of income tax receipts in Article 22, PPh Article 23 and PPh Article 4 Paragraph (2) decreased in 2020 in line with the

deductions/collections made by the Treasurer of Dispendukcapil. One of the obstacles experienced by the treasurer is the lack of fundamental knowledge of tax obligations that the government treasurer must carry out.

Keywords: Withholding and Collection Income Tax, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Government Treasure.